



Analisis Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kediri

Dodi Irawan: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, email: dodiirawan@gmail.com

Romli SA: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email: romli_uin@radenfatah.ac.id

Paisol Burlian: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email: paisol_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2024-09-10

Received in revised form

2024-10-10

Accepted 2024-11-17

Keywords:

Pengaturan, Politik Dinasti, Pemilihan Kepala Daerah.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Dodi Irawan, Romli SA, Paisol Burlian, Analisis Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Elqonun*, 2 (2) 1-23.

doi:

Abstract

Praktik Politik Dinasti yang sudah berjalan hampir 20 tahun, bisa dibidang Dinasti di Kabupaten Kediri merupakan pertama dan terlama eksistensinya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten Kediri bekerja dan mempertahankan kekuasaan? dan bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten Kediri bisa berkembang?. Penelitian ini menjelaskan awal mula atau sejarah sebuah dinasti ini terjadi berawal dari urusan bisnis lalu lanjut ke arah politik, dalam perkembangan dinasti ini hanya orang-orang terdekatlah yang menurut keluarga Sutrisno mampu dan bisa menjalankan atau meneruskan program-program yang sudah dibuat dan belum terlaksana dan banyak kerabat mulai dari golongan pengusaha serta pejabat baik dari tingkat desa hingga daerah yang siap membantu dan mengabdikan kepada dinasti ini dengan tujuan akan mendapatkan imbalan balik. Dinasti ini juga akan terus terjadi apabila peraturan atau undang-undang yang mengatur sebuah sistem demokrasi tidak mengalami perubahan yang secara pasti. Karena sifatnya yang inklusif dan tertutup membuat sebuah dinasti politik menjadi sangat sulit dicari sebuah kesalahannya. Sekilas tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Terlebih jika mengacu pada dalil demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinasti politik yang berkembang selama ini telah mencederai esensi demokrasi itu sendiri.

A. Pendahuluan

Pasca berakhirnya rezim otoritarian orde baru tahun 1998 silam, semangat dan gairah berdemokrasi tumbuh di mana-mana. Situasi yang menurut Haryanto¹ telah mengubah sistem politik dan melahirkan reformasi ini memberi peluang bagi berlangsungnya demokratisasi di Indonesia. Dalam konteks cakupan aktor penyelenggara kekuasaan, Tb. Massa Djafar² melihat terjadi perubahan demikian rupa di mana aktor-aktor yang terlibat dalam proses kekuasaan semakin plural. Secara vertikal, perubahan kekuasaan menunjukkan bahwa politik tidak lagi didominasi pemerintah pusat.

Demokrasi, meski tidak selalu mudah diwujudkan, memang diyakini oleh banyak pihak merupakan jalan yang paling tepat, sesuai natur kemanusiaan yang menghendaki kesetaraan, kebebasan dan partisipasi bersama, untuk mewujudkan masa depan tatakelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik. Itu sebabnya berbagai upaya penataan kelembagaan sistem politik sebagai wujud demokratisasi dilakukan di berbagai domain kehidupan politik, mulai dari pelaksanaan pemilu, penataan lembaga-lembaga politik kenegaraan, pengaturan baru relasi pemerintah pusat-daerah, penguatan kelompok-kelompok kepentingan dan lain-lain.³ Namun demikian, jalan menuju demokrasi tidaklah selalu mudah diwujudkan. Fenomena semacam itu pula yang terjadi di Indonesia pasca runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru.

Transisi dari rezim nondemokratik yang sentralistik menuju pemerintahan dan kehidupan politik yang sungguh-sungguh demokratis terbukti tidak mudah dilalui.

Berbagai hambatan dan distorsi mewarnai lanskap kehidupan politik dan agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia. Salah satu hambatan problematis yang sekaligus merupakan distorsi dalam kerangka demokratisasi dan penataan kehidupan politik yang lebih baik itu adalah munculnya fenomena dinasti politik di berbagai daerah. Fenomena kehadiran dinasti politik terutama di aras lokal dalam lanskap paradoks konsolidasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia, merujuk pada data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbukti cukup massif. Fenomena dinasti politik ini memperlihatkan gejala persebaran dan perluasan (proliferasi) ke arena kekuasaan dan jabatan-jabatan politik di lembaga egislatif, pusat maupun daerah, setidaknya gejala ini seperti terjadi di Kabupaten Kediri. Dinasti politik merupakan permasalahan yang disinyalir telah ada di Indonesia sejak presiden pertama kita, Ir. Soekarno, berkuasa. Meskipun dinasti politik tidak melanggar peraturan berdemokrasi, dalam praktiknya dinasti politik menahan adanya mobilisasi sosial, sebab kekuasaan hanya diasosiasikan pada golongan masyarakat tertentu saja.

Dinasti Politik saat ini banyak dibangun di beberapa kota dan kabupaten. Dinasti Politik ini mulai terlihat di Era Reformasi yang lebih dikenal demokratis. Dalam pemerintahan yang demokratis seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu rakyat juga diberi kebebasan untuk memilih wakilnya, dalam hal ini adalah walikota atau bupati. Namun dengan adanya Dinasti Politik ini, memberikan peluang yang sangat kecil bagi

¹ Haryanto, "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik". JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2009. 63

² Djafar, M. "Demokratisasi, DPRD, dan Penguatan Politik Lokal". Jurnal Poelitik, 2008. 4

³ Marijan, K. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana, 2010. 164.

rakyat untuk terlibat di dalam proses-proses politik karena mereka yang menjadi pemimpin saling mempunyai hubungan keluarga.

Dinasti Politik ini dijadikan sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaannya. Hal ini bisa terjadi karena macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon Kepala Daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga Kepala Daerah untuk menjadi pejabat publik. Dinasti Politik merupakan eksese negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggaran kekuasaan famili. Hal itulah yang kemudian memicu kalangan kerabat menjadi elit sebagai kata kunci pemahaman dinasti dalam praktek pemerintahan lokal.⁴ Dalam prakteknya sendiri aktualisasi dinasti politik dilakukan dengan beberapa sudut pandang yaitu neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik.

Politik dinasti merupakan serangkaian strategis politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tersebut tetap berada dipihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Terdapat pula pengertian positif dan negatif tentang politik dinasti. Negatif dan positif tersebut bergantung pada proses dan hasil (*output*) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh jaringan politik dinasti bersangkutan. Kalau proses pemilihannya murni dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalandkannya mendatangkan kebaikan

dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka politik politik dinasti dapat berarti positif. Akan tetapi bisa berarti negatif jika yang terjadi sebaliknya. Selain itu positif dan negatif arti politik dinasti juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum, penegakkan hukum, dan pelembagaan politik bersangkutan. Politik dinasti yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah serta pelembagaan politik yang belum mantap, maka politik dinasti dapat berarti negatif.⁵

Dijaman modern ini politik dinasti itu sudah dikatakan basi apalagi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi seharusnya sudah ditinggalkan, karena prinsip-prinsip demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan ada ditangan rakyat, rakyat memegang kendali melalui hak pilih yang dimilikinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Jadi dinasti itu lawannya dari demokrasi. Namun di era demokrasi ini dinasti juga masih tetap berlaku meskipun sudah ada partai politik atau pemilihan langsung. Dinasti dewasa ini melalui partai politik sehingga di sebut sebagai politik dinasti.

Politik dinasti itu bahasan lainnya adalah politik nepotisme para pejabat politik di Negeri ini sedang mempraktekan kebiasaan para raja terdahulu biasa dilihat bagaimana penguasa baik dipusat maupun didaerah berlomba-lomba untuk mengangkat sanak keluarga, saudara, kerabat dan orang-orang terdekat mereka untuk mengisi jabatan-jabatan diwilayah kekuasaannya. Kalau seperti ini apa

⁴ Haris Syamsudin, *Pemilu Langsung di tengah Oligarki Partai*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. 39

⁵ Burhanuddin Muhtadi, *Perang Bintang: Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres*, Jakarta: Mizan Publika, 2014. 30.

bedanya demokrasi dengan oligarki sama-sama dipegang oleh elit tertentu.⁶

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan. Tumbuh suburnya dinasti politik khususnya di daerah tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga dapat dipastikan dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat sendiri juga muncul sinyal upaya menjaga *status quo* di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.

Keluarga-keluarga yang berkuasa ini akhirnya akan berevolusi menjadi dinasti-dinasti politik di daerah yang akan sulit untuk dikalahkan dalam setiap pemilihan kepala daerah. Dengan demikian kekuasaan yang telah mereka miliki akan menjadi abadi.⁷ Dinasti juga menjadi bagaimana menciptakan kerajaan-kerajaan baru dilingkarannya kekuasaan atau strukturisasi hanya mendudukan keluarga,

anak dan kolega-koleganya.⁸ Politik Dinasti ada salah satunya melalui Pilkada, Pilkada merupakan ruang yang luas bagi warga negara untuk memilih bahkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil daerah yang dipilih secara langsung oleh DPRD menuai banyak catatan, diyakini bahwa pemilihan tersebut adalah hasil lobi politik, walaupun hasil tersebut akan dibawa ke pusat dan pemerintah pusat yang akan menentukan hasil akhirnya menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, pilihan oleh lembaga perwakilan bukan kehendak langsung oleh rakyat, bukan lagi kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kehendak umum, yaitu kehendak bersama sesuai dengan kepentingan umum. Seperti dikatakan Jean Jacques Rousseau, mengasumsikan bahwa kedaulatan rakyat bersifat mutlak, abadi dan utuh serta asli, berasal dari rakyat itu sendiri sehingga tidak dapat diwakilkan.⁹

Adanya otonomi daerah memotong sedikit peran pemerintah pusat dalam menentukan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagaimana bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati dan Walikota dipilih secara mandiri oleh DPRD Kabupaten/kota tanpa melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu, Bupati/Walikota harus bertanggung jawab kepada dan bisa diberhentikan oleh DPRD sebelum masa jabatannya usai. Sementara itu, pemerintah pusat (Presiden) hanya diberi kekuasaan untuk "*memberhentikan sementara*" seorang Bupati/Walikota jika

⁶ Democracy Maddick, *Desentralisation, and Development*, Bandung: Bombay-Asian Publishing House, 2005.145.

⁷ Hollyson Rahmat, *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*, Jakarta: Penerbit Lestari, 2015.150.

⁸ Ways A Muliensyah, *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik Dan Welfare State*, Yogyakarta: Buku Litera, 2015. 108.

⁹ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyelesaian*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014. 405.

dianggap membahayakan integritas nasional.¹⁰

Melihat rekam jejak dinasti politik dalam ketatanegaraan di Indonesia sebenarnya sudah ada dan terjadi sejak jaman kerajaan. Dimana raja adalah pemegang kekuasaan secara penuh. Kerajaan bersendi pada susunan dinasti, dimana anak keturunan raja diakui sebagai pengganti tahta ayahnya jika sang raja itu meninggal dunia, mati dalam peperangan atau sudah tidak mampu untuk menjabat sebagai seorang raja. Peran raja sangat besar, rakyat tidak punya kuasa penuh, tidak bisa melakukan apa-apa selain tunduk pada rajanya. Menarik membaca tesis Robert Filmer, yang dibantah oleh John Locke, yang menyatakan bahwa Tuhan yang memberikan kekuasaan kepada raja tetapi warga negaralah.¹¹

Dinasti politik yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan tidak beda jauh dengan masa pemerintahan era kolonial maupun jaman tradisional era kerajaan, bahkan gaya kepemimpinan tradisional di jaman modern di legitimasi oleh sistem demokrasi. Seperti kepemimpinan Ratu Atut di Banten. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengenal istilah dinasti politik. Sebagai contoh dinasti politik juga tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat dengan dinasti politik Kennedy dan Bush, keluarga Aquino, Arroyo, dan Conjuangco di Filipina, Gandhi di India dan di Indonesia Soekarno, Soeharto juga mempraktekan gaya kepemimpinan tradisional tersebut.

Dari beberapa contoh kasus dinasti politik di Indonesia dan sering terlibat skandal korupsi berarti dalam dinasti politik ada beberapa persoalan. Tentunya tidak

semuanya dinasti politik berujung kurang baik. Adanya perubahan dalam pemilihan kepala daerah dari pemilihan melalui DPRD dan sekarang pemilihan secara langsung oleh rakyat, seharusnya rakyat dapat lebih “cerdas” untuk menggunakan hak politiknya dan seharusnya kekuasaan dapat membawa perubahan kepada masyarakat bukan memakmurkan kekuasaan ekonomi politik keluarganya.¹² Karena pengalaman di negara-negara seperti India, Filipina, dan Amerika Serikat yang sudah lebih maju dan berkembang sistem demokrasinya dapat menularkan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada anggota keluarganya.¹³

Fenomena dinasti politik ditanggapi pro-kontra oleh sejumlah kalangan. Di satu sisi adanya fenomena dinasti politik merupakan dampak dari demokrasi yang memberikan kebebasan kepada warganegaranya untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya. Artinya dalam demokrasi sesungguhnya tidak ada dinasti politik karena pilihan dikembalikan ke rakyat. Namun di sisi lain, apabila tidak ada pembatasan terkait hak-hak politik yang hanya dikuasai keluarga justru akan mengancam demokrasi. Disinilah problematikanya. Kemeriahan politik di Indonesia pada masa reformasi saat ini yang memungkinkan semua orang dapat berpartisipasi dalam arena politik praktis, membuat hingar-bingar pertarungan politik menjadi riuh. Perang meraih dukungan yang paling nyata terlihat pada banyaknya tindakan yang dilakukan, diantaranya muncul fenomena politik dinasti, yaitu banyak muncul kandidat yang berasal dari kalangan keluarga sendiri.

B. Metode Penelitian

Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011. 19.

¹² Ni'matul Huda., *Perkembangan...*, Op. Cit. 418.

¹³ *Ibid*, hlm. 421

¹⁰ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2007. 72.

¹¹ Theodrik Simorangkir (ed.), *Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: *pertama*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi tersangka atau telah mendapatkan putusan pengadilan umum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal berkaitan dengan implikasi putusan MK terkait cikal bakal adanya dinasti politik dalam pilkada. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu berangkat dari pandangan dan doktrin para ahli guna mewujudkan konsep berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Latar Belakang Terjadinya Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kediri

Menurut Scruton¹⁴ dinasti adalah “*a class of sovereigns or rulers, whose succession is determined by blood relationship*”. Dalam bahasa sederhana dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah rezim politik atau aktor politik yang menjalankan kekuasaan pemerintahan secara turun-temurun, berdasarkan keluarga ataupun kekerabatan. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Di Indonesia dinasti politik sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan, padahal pada prakteknya dinasti politik disadari maupun tidak sudah berlangsung sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik adalah sebuah pola yang hidup pada masyarakat modern Barat maupun pada

masyarakat yang meniru gaya barat. Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina dan beberapa negara Asia lain. Studi politik dinasti yang dilakukan oleh Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder¹⁵ mengenai dinasti politik di Kongres Amerika Serikat sejak berdirinya tahun 1789 memberikan beberapa catatan. Pertama, terjadi korelasi antara dinasti politik dan kompetisi politik. Merebaknya politik dinasti berbanding lurus dengan kompetisi politik yang tidak sehat. Semakin tidak adil aturan main dalam kontestasi politik, semakin menyuburkan politik dinasti. Kedua, semakin lama seseorang menjadi anggota kongres, semakin cenderung mendorong keluarganya menjadi anggota lembaga tersebut. Kekuasaan yang cenderung memproduksi kekuasaan dalam dirinya dalam ungkapan mereka disebut dengan *power begets power*.

Agenda politik dinasti, dipraktekkan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap segala macam prosedur demokrasi modern. Sehingga mereka seakan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan regenerasi dan kaderisasi. Upaya untuk membangun politik dinasti pun dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur demokrasi, meskipun pada hakikatnya tidak sesuai dengan substansi demokrasi. Oleh karena itu fenomena dinasti politik di atas memang secara prosedural dapat dikatakan tidak ada yang salah. Namun, jika disimak secara cermat tentunya ada persoalan yang sangat serius menyangkut kegagalan partai politik melakukan kaderisasi, dan dalam merekrut calon kepala daerah. Ini terlihat dari dominannya keterlibatan sejumlah petahana (*incumbent*) dalam pilkada. Dengan demokrasi-melalui pilkada

¹⁴ Roger Scruton, *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3rd Edition*, New York: Palgrave Macmillan, 2007. 122

¹⁵ Ernesto Dal Bo and Dal Bo, Pedro and Snyder, Jason, 2009, *Political Dynasties*.....65

langsung dan desentralisasi di daerah otonom, dimaksudkan akan adanya pembagian kekuasaan dan menghindarkan kekuasaan pemerintahan tidak berada di tangan satu orang, satu keluarga, atau satu dinasti. Namun bagaimana realitas yang terjadi? Para kepala daerah incumbent seolah ajimumpung dan berlomba-lomba mempertahankan kekuasaan.

Hakekat klausul pembatasan seseorang hanya boleh menduduki jabatan kepala daerah maksimal dua kali secara berturut-turut sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah untuk menghindari agar tidak terjadi kepala daerah seumur hidup atau terlalu lama memegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan yang terlalu lama berada di satu tangan cenderung menjurus kepada praktek penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yang lazimnya berwujud rezim otoriter dan atau korup. Kuatnya pengaruh para incumbent dalam pemerintahan daerah, apalagi incumbent yang sudah berkuasa sepuluh tahun (dua kali masa jabatan), maka aparat pemerintah daerah pun mau tidak mau harus memberikan dukungan kepadanya agar karir, sumber ekonomi dan sosialnya tidak terganggu. Disadari atau tidak, dalam dua kali masa jabatannya seorang kepala daerah pastilah telah mampu membangun kultur birokrasi yang berkarakter patrimonial.

Kultur birokrasi demikian selanjutnya melahirkan hubungan-hubungan *patron-client*, baik antara kepala daerah dengan staf bawahannya, maupun antara kepala daerah dengan elit bisnis, sosial maupun politik di wilayah yang menjadi wewenangnya. Dengan mengerahkan kekuatan, kekuasaan dan akses dana besar yang dimilikinya untuk memengaruhi dan memobilisasi rakyat, melalui imbauan partisipasi maupun mobilisasi. Maka bukan hal yang aneh jika di berbagai pilkada, para incumbent mampu mempertahankan kekuasaannya. Dan

dengan kekuatan pengaruhnya itu pula, para kepala daerah incumbent dapat menang di berbagai pilkada.

Dinasti politik di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan, padahal pada prakteknya dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat. Dinasti politik di Indonesia sebenarnya sudah muncul di dalam keluarga Presiden pertama Indonesia, Preseiden Soekarno. Hal tersebut terbukti dari lahirnya anak-anak Soekarno yang meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai seorang politisi. Seperti Megawati Soekarno Putri (yang akhir-akhir ini juga semakin memperlihatkan gejala kedinastian politik Indonesia pada diri anaknya-Puan Maharani), Guruh Soekarno Putra, dan lain-lain. Dalam tatanan kontemporer, dinasti politik juga sekarang terlihat muncul pada diri keluarga mantan Presiden Indonesia Alm K.H. Abdurrahman Wahid, dengan munculnya saudara-sudara kandungnya dan juga anak kandungnya ke dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kecenderungan dinasti politik juga ditunjukkan dalam keluarga Presiden Indonesia saat ini Susilo Bambang Yudhoyono, yang ditunjukkan dengan kiprah anaknya Eddie Baskoro yang berhasil menjadi anggota DPR periode 2009/2014.

Hal tersebut di atas terjadi di Kediri, yang menjadi *trend* di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara dan mungkin juga di daerah lainnya. Di Kabupaten Asahan misalnya, Bupati Drs H Risuddin kini mendukung istrinya sendiri, Hj Helmiati untuk maju menggantikan dirinya sebagai bupati. Demikian halnya di Kabupaten Labuhan Batu, Bupati HT

Milwan juga telah lama mempersiapkan istrinya Hj T Adlina bersaing dalam Pemilu. Sementara di Kota Tebingtinggi, Walikota Abdul Hafiz Hasibuan tengah memoles dan bekerja ekstra keras mendudukkan adiknya Umar Zunaidi Hasibuan menjadi pengganti dirinya.

Dinasti Politik di Kediri dimulai sejak 1999 hingga saat ini masih dipimpin oleh satu keluarga. Fenomena dinasti di Kediri merupakan salah satu jenis Dinasti Politik Regenerasi, Modelnya seperti arisan keluarga. Ciri dinasti ini adalah kepemimpinan tanpa jeda, yakni satu keluarga memimpin satu daerah tanpa jeda. Pada tahun 1999 pada saat awal pasca reformasi dan pemilu masih belum dipilih oleh masyarakat secara langsung namun dipilih oleh anggota DPRD pada saat itu, bupati terdahulu banyak dari golongan perwira tinggi militer dan akhirnya setelah pasca reformasi baru pemimpin ditunjuk berdasarkan musyawarah anggota legislatif daerah atau biasa kita sebut DPRD, pada awalnya beberapa anggota DPRD belum memiliki calon nama untuk dilantik menjadi bupati karena pada saat itu masih belum ada figur yang mampu memimpin suatu daerah selain dari golongan militer.

Setelah mengalami beberapa kali musyawarah akhirnya munculah nama Ir.Sutrisno yang memiliki latar belakang sebagai PPL pada bidang pertanian. Selain melihat dari latar belakang, kinerja dari Sutrisno juga sangat bagus karena ia memiliki semangat juang yang tinggi untuk membawa pertanian di desa menjadi maju dan berkembang, lalu setelah DPRD melalui musyawarah akhirnya terpilihlah Ir. Sutrisno sebagai Bupati.

Tahun 2004 merupakan tahun dimana Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, pada tahun tersebut bupati Sutrisno sebagai petahana hendak mencalonkan kembali sebagai bupati, beliau merasa bahwa ia mampu membawa

dan memimpin Kabupaten Kediri menuju perubahan dan perkembangan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Dan beberapa masyarakat pada saat itu juga merasakan bahwa pak Sutrisno mampu membawa Kediri dalam perubahan. Hal itulah yang menjadi awal kekuasaan Sutrisno dalam dua periode.

Selanjutnya pada 2009 merupakan masa berakhirnya Ir.Sutrisno menjadi Bupati Kediri dan ternyata kekuasaan Sutrisno tidak berhenti selama dua periode, Majunya dua istri bupati Kediri yang notabene mereka itu sebagai madu antara satu dan lainnya dalam Pilkada Kabupaten Kediri periode 2009-2014 sungguh menarik untuk diamati. Betapa tidak dengan alasan karena Sang suami tidak bisa mencalonkan lagi menjadi bupati Kediri karena alasan persyaratan (sudah dua kali periode sebagai bupati), maka dia mencalonkan dua istrinya sekaligus sebagai kandidat bupati. Tak dapat dielakan, banyak pihak yang mencium alasan pencalonan mereka dikarenakan “takut” kursi bupati Kediri jatuh ke orang lain atau karena adanya persaingan antara dua orang madu, sehingga persaingan antara dua orang istri ini terjadi.

Setelah lama tak terdengar, isu politik dinasti kembali mencuat pada tahun 2015. Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan pada tahun 2015 Kabupaten Kediri mengikuti pilkada serentak pada 9 Desember. Pada pilkada serentak saat itu, Haryanti kembali maju sebagai calon bupati petahana. Modus yang digunakan Haryanti kali ini adalah untuk melanjutkan program-program kerjanya yang belum selesai. Banyak media yang menuding bahwa keluarga besar Haryanti sedang membentuk politik dinasti di Kabupaten Kediri.

2. Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kediri Bisa Berkembang

Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kediri bisa berkembang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Figur dan Peran Sutrisno

Eksistensi Dinasti Sutrisno pada puncak kekuasaan di Kediri bertahan karena kemampuannya mempergunakan jaringan patronase yang terkonveksikan melalui klientistik sebagai dukungan politik yang terus berkembang dan tak berubah sepanjang zaman serta berkelanjutan dan kepemimpinan yang diterapkan dalam menerapkan metode kepemimpinan yang diterapkan melalui pendekatan dengan metode non formal yang tidak resmi dengan memakai kebijaksanaan secara pribadi tanpa melihat lataran belakang masyarakat. Dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Kebijaksanaan dalam praktik politik kekeluargaan menjadi semacam mantra yang mampu mengubah relasi formal menjadi personal. Namun jika bicara soal real politik, dinasti dalam politik itu bisa bertahan karena orang-orang dilingkaran dinasti mempunyai kemampuan dan sumber daya yang besar. Sementara orang lain tidak bisa menandinginya. Ada pun beberapa faktor yang membuat sebuah dinasti bertahan seperti konsolidasi parpol, konsolidasi proyek, konsolidasi politik dan konsolidasi pokok-pokok organisasi yang dianggap dekat dengan masyarakat.

Sejarah panjang awalnya sutrisno sebelum menjabat menjadi bupati Kediri ialah menjadi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam bidang pertanian figur sutrisno pada saat itu menjadi sangat penting sebelum menjadi ketua DPC PDIP hingga sekarang, pada jaman pasca reformasi pada saat itu banyak elit pejabat yang melihat selain sutrisno memiliki etos kerja yang

baik dan berlandaskan semangat pada saat dahulu bekerja sebagai PPL dalam bidang pertanian yang memiliki etos semangat kerja yang tinggi serta bijaksana dalam setiap mengambil keputusan menjadikan beliau salah satu figur yang sangat penting pada saat itu serta banyaknya relasi dengan pejabat pemerintahan desa dan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di kabupaten Kediri. Maka dari itu beberapa tokoh masyarakat serta elit sepakat untuk merekomendasikan sutrisno untuk menjadi bupati pada tahun 1999 atau pasca reformasi pemilihan kepala daerah atau bupati masih dipilih atau ditunjuk oleh DPRD Kabupaten, Sebelumnya juga ada beberapa kandidat yang dicalonkan oleh beberapa anggota fraksi namun pada saat musyawarah akhirnya Sutrisno yang terpilih menjadi Bupati pada saat itu dan setelah itu pada tahun 2004 pemilihan langsung pertama digelar, Sutrisno mencalonkan lagi sebagai Bupati atau Petahana, beliau merasa bahwa mampu program kerja yang beliau terapkan masih harus dilanjutkan atau diteruskan dan beliau merasa masih mampu untuk memimpin Kabupaten Kediri. Setelah mengalahkan beberapa kandidat lain.

2. Desentralisasi Kekuasaan

Membahas mengenai pemerintahan daerah pasti tidak terlepas hubungannya dengan desentralisasi. Menurut pengertian secara umum desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu daerah.¹⁶

Maka seiring desentralisasi, demokratisasi di daerah justru menjadi proses revitalisasi kekuatan elite lokal atau tradisional untuk berkuasa. Elite lokal berupaya mengukuhkan kembali

¹⁶ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Setara Press, 2019. 84.

pengaruhnya sebagai pemain utama. Kewenangan yang sebelumnya hanya ada di pusat, kini digeser ke daerah-daerah. Kepala-kepala daerah itu bisa tumbuh dari bawah (masyarakat). Awalnya tumbuh dari bawah dan disertifikasi (dipilih) dari bawah juga. Tapi sekarang ditarik dari atas (elite lokal). (Kepala daerah) tumbuh dari bawah, dari samping, mungkin dari atas, dan disertifikasinya dari atas. Pemerintahan yang terdesentralisasi sebenarnya merupakan organisasi yang semi dependen. Artinya, organisasi pemerintahan tersebut memiliki kebebasan (terbatas) bertindak tanpa mengacu pada persetujuan pusat, tetapi statusnya tidak dapat dibandingkan dengan negara berdaulat, persoalannya tidak sederhana ketika unit-unit pemerintahan yang terdesentralisasi harus dibatasi kewenangan dan diatur hubungan kelembagaannya satu dengan yang lain. Setiap negara pasti mengalami ketegangan bahkan konflik antarunit atau tingkat pemerintahan sebagai akibat dari penataan kelembagaan yang tidak tepat.

3. Politik Transaksional

Faktor selanjutnya terjadinya politik transaksional antara Sutrisno dengan beberapa Elit di desa ataupun daerah. Selama bekerja menjadi PPL beliau juga menjalin relasi dan melakukan komunikasi kepada banyak pihak terutama pemangku kekuasaan di desa yang ada di wilayah kabupaten Kediri. Beliau menjalin kerjasama dalam bentuk politik transaksional kepada para pejabat pemerintahan desa salah satunya adalah pembangunan infrastruktur di desa, dampaknya adalah simpati dan dukungan masyarakat agar tertuju pada beliau karena beliau berhasil membantu pembangunan di desa-desa di wilayah Kabupaten Kediri yang selama ini tertinggal dan akhirnya bisa berkembang. Hal ini dikarenakan kekuasaan incumbent digunakan untuk meningkatkan kekuatan politik para kerabat misalnya dengan menggunakan sumber

daya publik untuk pengayaan pribadi atau untuk mendanai partai dan praktik *clientelistic* yang merupakan pendukung penting suksesnya pemilihan di banyak negara berkembang. Dengan sektor-sektor vital yang telah dipegang oleh anggota keluarga, maka kekuasaan serta kewenangan akan semakin mudah untuk dijalankan. Terdapat bukti nyata bahwa *incumbency* akan memberikan kesempatan lebih besar pada anggota keluarga untuk menduduki suatu jabatan tertentu dibandingkan dengan kandidat politisi tanpa koneksi kerabat di dalam sistem politik. Di satu sisi keuntungan diperoleh kandidat politik untuk meraup suara dengan memanfaatkan *incumbency* dalam sistem politik, di sisi yang lain hal tersebut akan menciptakan dinasti politik yang rawan akan penyelewengan etika politik.

Dinasti Sutrisno melihat distribusi sumber daya patron sebagai sebuah kewajiban untuk berbagi dengan warga daerah lainnya melalui ruang-ruang yang disediakan oleh struktur sosial dan ekonomi setempat. Artinya distribusi sumber daya patron tersebut merupakan bentuk kepekaan sosial sebuah dinasti politik terhadap lingkungannya tanpa disertai dengan motif politik. Sebagaimana orang yang pernah menerima jasa-jasa baik, bantuan dan pekerjaan atau jabatan, maka para Klein berusaha membalas kebaikan-kebaikan tersebut dengan tetap setia berada dalam jaringan klien. Mereka berusaha mengidentifikasi diri sebagai klien yang setia kepada patron dengan memberikan dukungan dan mobilisasi suara pada pemilihan Kepala Daerah atau lainnya.

Masyarakat di Kediri seolah-olah sudah dibuat terkondisikan oleh sikap dan kebijakan Sutrisno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pada saat istrinya menjabat dua periode menjadi bupati, Pak Sutrisno juga diberikan jabatan yang sangat penting dalam pemerintahan kabupaten Kediri yaitu menjadi Ketua TPPD, hal

inilah yang dimanfaatkan betul oleh beliau dengan melakukan kartelisasi politik dalam bentuk forpimda, banyak relasi pejabat atau orang yang bekerja dibawahnya mengabdikan dengan loyal agar mendapat imbal balik dalam bentuk jabatan atau proyek-proyek strategis dalam pembangunan pemerintahan dengan tujuan agar segala urusan pemerintahan dan kekuasaan yang telah dibangun tetap berjalan sesuai dengan rencana Sutrisno, akhirnya banyak pihak yang berlomba-lomba yang mendekat dan siap membantu Pak Sutrisno dan Bu Haryanti baik dari orang lama atau orang baru. Hubungan timbal balik antara patron-klien yang saling menguntungkan inilah yang menjadikan bertahannya sebuah kekuasaan dalam satu wilayah. Ini merupakan salah satu bentuk pendekatan politik dengan cara melibatkan masyarakat dalam proyek ekonominya. Apalagi didukung dengan adanya anggaran dana desa dari pemerintahan pusat juga menjadikan segala kebijakan dari Sutrisno yang dibuat melalui istrinya bisa berjalan dengan efektif. Dengan berada dibalik layar Sutrisno bias lebih leluasa dalam mengatur jalinan relasi keluarga yang menduduki kursi daerah beserta pejabat legislatifnya untuk tetap solit dan konsisten pembangun politik dinasti.

4. Relasi Kapitalis-Birokrasi

Ada banyak alasan untuk menyimpulkan politik dinasti dan dinasti politik bisa tumbuh subur di Indonesia, baik dilihat dari faktor budaya, kognitif-emosional, maupun sosial-ekonomi. Kecenderungan pengkultusan tokoh yang dikelilingi sejumlah mitos, jejak-jejak feodalisme yang masih tampak jelas, struktur dan interaksi sosial yang masih tak egaliter, dan kesenjangan antar warga dalam ekonomi dan pendidikan, bisa jadi alasan tersebut.

Pertama-tama, yang perlu diletakkan terlebih dahulu dalam membahas perkembangan dinasti politik di daerah

adalah memerhatikan jaringan kekuasaan terbentuk dalam ranah formal dan informal yang umumnya terjadi dalam nalar ekonomi-politik. Hal tersebut dilakukan kepala daerah sebelum pada langkah berikutnya mulai menempatkan kerabatnya sebagai proyek dinasti politik. Adapun jejaring kekuasaan kepala daerah tersebut dibangun atas sinergitas birokrasi, kapitalis, dan politisi yang membentuk jaringan kuasa formal dan informal dalam masyarakat aras lokal. Narasi mengenai politisasi fungsi maupun mobilisasi birokrat menjadi agen penting *vote getter* dalam Pemilu tidak bukanlah praktik baru karena hal itu sudah banyak dilakukan di berbagai tingkatan kota dan kabupaten. Politisi biasanya digunakan untuk mengamankan pencalonan kerabat yang hendak maju dalam Pemilu maupun jabatan strategis lainnya di daerah.

5. Faktor Familisme atau Keluarga

Dinasti politik familisme berbasis populisme yang ditonjolkan dalam suksesi pemerintahan adalah upaya “mengamankan” program kepala daerah sebelumnya. Hal ini terkait reproduksi wacana heroism dan populisme program pemerintahan sebelumnya yang dijadikan bahan kampanye kerabat untuk menggantikan kerabatnya yang lain. Meskipun istrinya telah menjadi bupati formal, suami masih berperan besar dalam bupati informal yang bisa memberikan masukan tertentu kepada istrinya. Artinya, pengaruh maskulinisme kuasa keluarga masih berlaku dalam pemerintahan sekalipun kedudukan istrinya lebih tinggi sebagai bupati daripada suaminya yang kembali sebagai kawula biasa.

Kondisi itu turut juga mengubah paradigma rumah tangga yang semula hanya berwujud satu rumah kini telah berwujud daerah. Dalam tataran inilah, “kuasa gono-gini” tersebut berlaku. Istri berada di ranah domestik formal sementara suami berada di arena sosial informal. Pada

akhirnya model dinasti politik yang seperti ini berbentuk pemerintahan boneka karena yang sebenarnya berkuasa adalah suaminya, sementara istrinya hanya menjadi simbolis pemerintahan. Preferensi pemilih di ketiga daerah ini dalam memilih kepala daerah masih dibayang-bayangi populisme kepala daerah yang terdahulu sehingga calon kepala daerah yang dipilih biasanya yang mendekati figur atau memiliki ikatan langsung dengan kepala daerah tersebut. Bahkan tidak mungkin kalau suami tersebut terbebas dari masa kurungan tersebut akan kembali menjagokan kembali menjadi bupati menggantikan istrinya. Dalam model dinasti politik seperti ini, aroma oligarki terasa namun tidak begitu kuat karena sebenarnya yang dibangun adalah romantisme dan populisme yang berbaur dengan oligarkis. Oleh karena itu, menyebutnya sebagai bentuk mafia lokal dalam istilah Sidel agaknya kurang tepat untuk mendeskripsikan konteks ini.

Masyarakat yang sejatinya menjadi aktor utama dalam proses demokratisasi lokal di daerahnya justru malah menjaga *status quo* kepemimpinan oligarkis ini sebagai bentuk loyalitas dan afinitas terhadap redistribusi program populis yang dijalankan melalui skema politik 'gentong babi'. Untuk itu, penulis lebih menyebut dinasti politik dalam ketiga kasus ini sebagai *populism oligarchy* atau *populism dynastie*, karena logika oligarki dibangun atas popularitas calon yang didukung program populis melalui politisasi anggaran. Selama hampir kurang lebih 15 tahun menjalankan dinasti politik, Sutrisno dan keluarga sudah menguasai beberapa aset penting di daerah kabupaten Kediri, tidak hanya Sutrisno, beberapa anggota keluarga beliau juga menjabat pada jabatan strategis baik eksekutif maupun legislatif. Hal ini lah yang juga menjadi faktor pendukung sutrisno dalam mengembangkan kekuasaannya dalam

bentuk dinasti politik. Seperti contoh adik ipar sutrisno, H. Sulkani adalah ketua DPRD Kabupaten Kediri selain itu ada Rahmadi Yogiantoro yang menjadi menantu beliau bekerja sebagai Ketua KADIN dan juga Ketua Karangtaruna Kabupaten Kediri dan ada beberapa anggota keluarga lain yang menjabat posisi strategis pada sektor pemerintahan. Selain itu juga *factor civil society* yang tidak teroganisir membuat pemerintahan sutrisno sangat minim diserang oleh beberapa isu-isu buruk dan lawan-lawan politiknya, hal ini bisa terjadi karena sutrisno berhasil mengondisikan masyarakat Kediri serta sifat dinasti politik sendiri yang sangat inklusif.

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang memiliki fungsi menyalurkan aspirasi rakyat. Tetapi dalam pemilihan ketua umum partai atau pejabat lainnya rakyat tidak memilihnya melainkan anggota partai tersebut yang memilihnya. Sebagai contoh Pak Sutrisno sebagai ketua DPC langsung menunjuk Istrinya untuk menjadi calon bupati dari partai PDIP, padahal Haryanti sendiri bukan kader atau anggota partai. Beliau juga berasalan bahwa hanya Bu Haryanti lah yang mewarisi ketrampilan politik dari Pak Sutrisno sendiri. Tentu beberapa rakyat menilai itu menyalahi etika politik, tetapi beberapa anggota partai tersebut menyatakan tidak karena itu pemilihan yang dilakukan dalam partai mereka. Walaupun kita kembali mengingat partai politik merupakan wadah aspirasi masyarakat dalam berpolitik. Kurangnya sosok figur atau lawan politik yang memiliki elektabilitas yang tinggi juga menjadikan salah satu penyebab berkembangnya dinasti ini, secara tidak langsung di internal partai PDIP sendiri sutrisno juga sudah mematikan fungsi partai politik itu sendiri, mencari pemimpin-pemimpin baru yang ideal dari kader-kader partai. Hal inilah yang

menyebabkan masyarakat Kediri beberapa tahun terakhir juga mengalami penurunan dalam tingkat partisipasi pemilih yaitu hanya sekitar 60%. Dinasti politik memang merupakan produk dari demokrasi modern. Tapi keberhasilan dalam membentuk sebuah dinasti politik itu sendiri, diserahkan pada pasar, yaitu pemilih dalam pemilu.

6. Hubungan Patron dan Klien

Secara umum, basis fondasi kekuasaan formal dinasti politik lokal di Indonesia dibangun berdasarkan hubungan paternalistik melalui redistribusi program populis yang dihasilkan melalui skema politik 'gentong babi' (*pork barrel politics*) maupun politisasi siklus anggaran (*politic budget cycle*). Hal itulah yang kemudian mendorong adanya hubungan kedekatan maupun romantisme antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga pemimpin mudah dalam membentuk politik persuasif melalui gelontoran uang hingga ke pelosok. Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, politisasi birokrat maupun sosialisasi tokoh informal masyarakat menjadi bagian intimitas yang bertindak sebagai agen intermediasi dalam memenangkan dan melanggengkan kekuasaan famili politik.

Perbincangan mengenai dinasti politik dalam ranah politik lokal sangatlah berbeda dengan konteks dinasti politik yang terjadi di level nasional. Dalam ranah lokal, romantisasi nama besar familisme menjamin suatu dinasti politik dapat eksis secara terus-menerus. Familisme sendiri dibentuk atas tiga hal, yakni figur (*personalism*), *klientelisme* (*clientelism*), dan tribalisme (*tribalism*), sebagai ketiga kunci dalam mengurai basis-basis terbentuknya *tren* familisme kekuasaan dalam demokrasi lokal di Indonesia.¹⁷

Ketiga proses tersebut berperan besar dalam suksesi pemerintahan lokal di Indonesia yang dilakukan dalam dua jenis

yakni secara *by design* dan *by accident*. Dinasti politik yang *by design* sudah terbentuk sejak lama dimana jejaring familisme dalam pemerintahan sendiri sudah kuat relasionalnya sehingga kerabat yang ingin memasuki kancah pemerintahan maupun politik sudah didesain sejak awal untuk menempati pos tertentu.

Banyaknya kerabat Sutrisno mulai dari tingkat desa hingga daerah menjadi faktor selanjutnya, seperti halnya hubungan patron-klien apabila orang-orang yang sudah diberi kepercayaan Sutrisno dan mampu menjalankan tugas atau perintah yang diberikan maka ia akan mendapatkan imbalan baik secara materiil maupun imateriil adapun dalam bentuk jabatan atau diberikan proyek-proyek pembangunan strategis. Mendekati pemilihan bupati yang akan digelar pada tahun 2019, salah satu anggota keluarga dari Sutrisno yaitu Yogi Rahmanto yang bertatus sebagai menantu, beberapa waktu akhir ini mulai berusaha mencari simpati serta suara beberapa elemen masyarakat Kediri terutama golongan pemilih muda pemula dengan cara mengadakan acara-acara yang sifatnya partisipatif. Yogi Rahmanto disini bertindak sebagai Ketua Penyelenggaranya atau Pelaksananya, hal ini merupakan salah satu bentuk marketing politik dengan tujuan agar masyarakat mengenal Yogi Rahamanto sebagai seorang politisi ataupun figur yang sangat dekat dengan warga. Koneksi kekerabatan atau kekeluargaan dalam ranah politik sangat menguntungkan bagi kandidat, Dimana kandidat dapat memanfaatkan nama besar keluarga dengan jabatan tinggi di dalam sistem politik untuk meraup suara. Hal inilah merupakan salah satu bentuk dari kesiapan keluarga Sutrisno dalam melanjutkan *estafet* kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Kediri.

¹⁷ Djati, Wasisto Raharjo. "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti

Politik di Arus Lokal" The Journal of Political, Volume 39, No 2, Maret, 2013.

7. Praktik Shadow State dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kediri
Pada lembaga eksekutif di Kabupaten Kediri, terdapat 1 aktor utama yang memiliki peranan penting dalam konstelasi selama masa kepemimpinan Haryanti, yaitu adalah suaminya sendiri Ir.Sutrisno yang juga adalah mantan bupati Kediri selama dua periode. Selain itu ada juga aktor yang memiliki peran penting pada lembaga legislatif yaitu H. Sulkani yang tidak lain adalah saudara dari Sutrisno. Kendati diantara kedua aktor ini memiliki kepentingan dan sumberdaya politik yang berbeda, namun relasi antara keduanya cukup solit pada pemerintahan kabupaten Kediri. Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa antara dua aktor tersebut dapat membangun relasi kekuasaan yang relatif cukup solid. Faktor pertama karena direkat oleh adanya ikatan kolega birokrat. Sulkani dan Sutrisno adalah kedua aktor yang sudah lama berkecimpung dalam dunia perpolitikan di Kediri, dua orang ini selalu mendapatkan jabatan strategis pada saat masih menjabat. Hubungan inilah yang telah menjadi trust building antara mantan ketua bupati dan ketua DPRD.

Dalam beberapa temuan dari narasumber yang saya dapat juga dikatakan bahwa Sutrisno mengintervensi aparat atau birokrat agar mereka bersedia melaksanakan perintah Sutrisno. Selain itu juga ketika dalam rapat atau kunjungan kerja kehadiran Sutrisno selalu tidak jauh dari samping Haryanti, dalam beberapa kegiatan Sutrisno juga ditunjuk untuk memimpin rapat kerja, sedangkan Haryanti

sebagai bupati yang memiliki legitimasi untuk memimpin rapat maupun briefing hanya banyak diam. Ada beberapa kebijakan ataupun peraturan yang dibuat dan dikeluarkan pemerintah kabupaten Kediri yang tidak jauh dari campur tangan sutrisno, di sini dapat disimpulkan bahwa Haryanti hanyalah wayang sedangkan Sutrisno adalah wayang. Beliau bertugas untuk memerintahkan, menggerakkan dan mengarahkan istrinya dalam setiap hak politiknya agar sesuai dengan yang diperintahkan. Padahal Sutrisno sudah jelas hanya sebagai mantan bupati yang tidak memiliki legitimasi dalam pemerintahan namun fakta dilapangan justru berbanding terbalik terhadap itu.

D. Kesimpulan

Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kediri yaitu presenden buruk dari demokrasi yang berkalu di Indonesia selama ini, disamping itu berdampak negatif dari sisi Politik, ekonomi dan Hukum, Selanjutnya Politik Dinasti ini bisa berkembang karena adanya hubungan Patron-Klien sangat kuat yang mendukung dinasti ini akan terus berjalan sampai kapanpun, dan tentunya sangat sulit untuk memutus rantai hubungan ini karena sudah berjalan belasan tahun lebih. Regenerasi hubungan antara Patron dan Klien juga masih sangat kuat hubungan mereka dari bapak hingga ke anak dan bahkan hingga cucu nya kelak juga menjadi faktor pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Burhanuddin Muhtadi, *Perang Bintang: Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres*, Jakarta: Mizan Publika, 2014.
- Democracy Maddick, *Desentralisasition, and Development*, Bandung: Bombay-Asian Publishing House, 2005.
- Haris Syamsudin, *Pemilu Langsung di tengah Oligarki Partai*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Hollyson Rahmat, *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*, Jakarta: Penerbit Lestari, 2015.
- Marijan, K. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- , *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Peneyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Setara Press, 2019.
- Roger Scruton, *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3rd Edition*, New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Theodrik Simorangkir (ed.), *Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.
- Ways A Muliansyah, *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik Dan Welfaree State*, Yogyakarta: Buku Litera, 2015.

Jurnal

- Djafar, M. "Demokratisasi, DPRD, dan Penguatan Politik Lokal". *Jurnal Poelitik*, 2008.
- Djati, Wasisto Raharjo. "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Arus Lokal" *The Journal of Political*, Volume 39, No 2, Maret, 2013.
- Haryanto, "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik". *JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2009.